

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan yang sejati terhadap manusia nampak dengan terwujudnya humanisasi dirinya serta dunia dan sosialisasi seluruh kehidupan. Eksistensi manusia adalah koeksistensi. Manusia tidak bisa ada dan berkembang tanpa kehadiran subyek (orang) lain. Keberadaan manusia dituntut oleh keberadaannya dengan sesama yang lain. Sebagai persona mengadakan komunikasi dengan sesamanya, dan membuka diri sendiri kepada mereka adalah kebutuhan pokok bagi manusia.¹ Oleh karenanya, dunia ini bukan sebagai sekumpulan individu yang terisolasi; tetapi semuanya terhubung satu sama lain dengan satu atau beberapa cara tertentu.

Salah satu ciri khas manusia yang sungguh manusia adalah kesanggupannya memisahkan diri dari sifat murni kehewanan, yaitu ketidaksadaran serta naluri alamiah semata. Manusia memiliki kebebasan sebagai fakultas dalam dirinya, melekat padanya (*in se*). Manusia telah mengangkat kodrat dirinya pada keadaan ideal di mana mereka mampu menguasai dan bersosialisasi dengan lingkungan kehidupan. Menjadi persoalan, bila muncul kondisi atau situasi tertentu yang membuat manusia seakan dikendalikan oleh seorang atau sekelompok orang di luar dirinya.² Hal ini seakan menjadi petanda bahwa pada kenyataannya manusia masih belum sampai pada situasi yang benar-benar ideal dalam mengekspresikan keberadaan atau kehendaknya sebagai manusia.

¹ Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia Jendela Minyingskap Humanisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hal. 112.

² Alan Woods Ted Grant, *Nalar Yang Memberontak Filsafat Marxisme Dan Sains Modern*, Rafiq Nadezhda (Penerj.), (Yogyakarta: Resist Book, 2015), hal. 574.

Konsep tentang manusia dan kebebasan ini juga dibicarakan oleh Hegel dalam karyanya, *Fenomenologi Roh (Phanomenologie des Geistes)*. Menurut Hegel, pada diri manusia, roh itu menjadi sadar dan roh itu sendirilah yang memengaruhi manusia untuk menciptakan wilayah roh. Roh membimbing sejarah guna membebaskan manusia dari segala belenggu kehidupan.³ Sejarah itu berada pada kekuasaan seorang individu, tidak dalam kekuasaan suatu bangsa, klan, kelompok atau ras tertentu. Ada *roh absolut* yang menjadi pusat atau sentral dari kesadaran manusia. Manusia yang dimaksudkan oleh Hegel bukanlah manusia sebagai perorangan, melainkan manusia dalam kelompok masyarakat sebagai bangsa dan negara.

Pernyataan inilah yang menjadi *terminus a quo* (titik tolak) kritik Marx atas Hegel. Nampak bahwa Hegel menjelaskan sejarah sebagai gerak ke arah rasionalitas dan kebebasan. Roh semesta ditempatkan di belakang sejarah dan mendapatkan objektivitas di dalamnya. Filsafat Idealisme Hegel menganggap bahwa kekuatan yang menggerakkan sejarah adalah *roh absolut* yang ia temukan dalam ajaran/teologi keagamaan; terutama dalam agama kristen yang mengenal adanya Roh Kudus. *Roh absolut* yang menggerakkan sejarah dan membawa manusia pada kebebasan.

Bagi Marx, Filsafat Hegel berjalan di atas kepalanya, sehingga filsafat ini perlu disangsikan. Sesungguhnya teori, interpretasi, spekulasi dan sebagainya, tidak menghasilkan atau menyebabkan perubahan dalam tatanan masyarakat. Perihal yang dibutuhkan ialah tindakan, kegiatan ekonomi, dan praksis. “Surga” (yaitu dunia ide-ide) harus ditinggalkan demi kepentingan “dunia” (Kenyataan material).⁴ Konsep tentang kebebasan yang berasal dari

³ K. Bertens, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 120-121.

⁴ Herry Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), hal. 68.

kesanggupan *roh absolut* yang menyejarah perlu diturunkan ke dalam bentuk penjelasan yang lebih kontekstual dan real.

Kritik atas idealisme Hegel di atas memungkinkan Marx untuk mengangkat konsep materialisme. Materialisme Marx dilihat sebagai kritik atas idealisme Hegel yang direduksi oleh materialisme Feuerbach sebelumnya. Inti materialisme Feuerbach adalah kritiknya terhadap agama; yang oleh Hegel disebut sebagai bentuk pengenalan akan *roh absolut*. Dasar kritik agama Feuerbach adalah pernyataan bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi sebaliknya, Tuhan merupakan produk dari imajinasi manusia. Menurut Feuerbach, agama hanyalah sebuah proyeksi manusia. Eksistensi Allah, malaikat, surga, neraka merupakan ilusi, hanya merupakan gambar yang dibentuk manusia tentang dirinya sendiri dan situasi yang tengah ia hadapi. Sehingga bagi Feuerbach, agama tidak lebih dari proyeksi esensi manusia.⁵

Atas sistem berpikir yang dipetakan oleh Feuerbach di atas, Marx sampai pada pemahaman tentang sejarah yang bersifat material, mengacu pada kondisi-kondisi fundamental eksistensi manusia. Lebih jauh, Marx melihat agama hanyalah sebagai tanda keterasingan manusia, tetapi tidak menjadi hal dasariah. Marx menghendaki kritik Feuerbach seharusnya tidak hanya berhenti pada agama yang hanyalah gejala sekunder keterasingan, tetapi harus sampai kepada kritik atas masyarakat. Realitas sosial harus disentuh untuk mencari tahu apa yang menjadi alasan manusia mengasingkan dirinya dalam agama.

Materialisme merupakan pandangan metafisis yang memetakan bahwa materi sebagai yang sungguh-sungguh real, sedangkan kesadaran hanyalah gejala-gejala samping dari proses-proses material. Metode materialis Marx membedakan pandangannya dari pandangan Hegel atau lebih

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hal. 68.

tajam dari pandangan materialisme Feuerbach. Obyek studinya adalah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang nyata dan terhadap pengaruh pandangan hidup manusia yang sebenarnya, yakni cara berpikir dan merasa. Singkatnya terhadap realitas/kondisi ekonomi. Kondisi atau kegiatan ekonomi adalah basis (*unterbau*) yang memengaruhi bangunan atas (*uberbau*); yakni tatanan institusional dan tatanan kesadaran kolektif, misalnya kepercayaan, ideologi, nilai dan norma.

Struktur ekonomi dilihat sebagai barometer dan menjadi pengaruh terbesar atas hukum perkembangan masyarakat. Kemajuan suatu peradaban dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan perekonomian masyarakat. Melalui kemajuan ekonomi, kita dapat menyaksikan kemajuan model atau pola peradaban manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama, perkembangan negara dan masyarakat global yang kita alami sampai hari ini terus bergerak (dinamis); mulai dari masyarakat primitif, negara budak, negara feodal, kapitalis hingga negara sosialis seperti yang diperjuangkan Marx dan Engels.

Terhadap perkembangan masyarakat tersebut, pertimbangan rasionalitas dalam suatu pola laku kesejahteraan ekonomi dengan pengaruh yang begitu besar terhadap perubahan suatu tatanan sosial, tidak boleh didasarkan terutama pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi diupayakan untuk mencapai kepentingan umum atau kebaikan bersama (*bonum commune*). Hal ini dimaksud agar tidak membentuk lingkungan masyarakat yang menindas dan ditindas. Eksistensi individu harus dilihat sebagai kekayaan dalam kelompok sosial. Oleh karenanya, Adam Smith dalam salah satu tulisan ia berpendapat demikian:

“Man according to the Stoics, ought to regard himself not as something separated and detached, but as a citizen of the world, a member of the vast commonwealth of nature', and 'to the interest

of this great community, he ought at all times to be willing that his own little interest should be sacrificed".⁶

Demikianlah Smith tidak menafikan entitas sosial sebagai yang lebih luas daripada individu. Namun persoalannya, kecenderungan bersikap sosial hanya lebih nampak sebagai sebuah pesan etis ketimbang potret kenyataan. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari nampak jarak pemisah antara pemahaman nilai atau moralitas dengan kenyataan perilaku manusia. Hal ini yang membuat suatu pesan etis tersebut mungkin tidak terealisasi. Lantas negara hadir sebagai institusi atau lembaga, yang kemudian menjamin pemenuhan atas keberagaman kebutuhan dari seluruh elemen masyarakat. Negara muncul karena ketidakcukupan individu untuk menyediakan kebutuhan bagi dirinya sendiri.⁷ Tugas utama negara adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan.

Marx dalam kritiknya atas negara, menyatakan bahwa negara sebenarnya tidak mengabdikan kepada masyarakat, melainkan hanya melayani kelas-kelas tertentu saja. Negara dikendalikan sebagai alat dalam tangan kelas-kelas atas untuk mempertahankan kedudukan mereka.⁸ Hubungan yang terbentuk dalam konstitusi suatu negara tidak lebih dari hubungan pertentangan antarkelas. Kelas atas dan kelas bawah. Ada pengisapan/eksploitasi kelas bawah (para buruh) oleh kelas atas yang adalah pemilik modal. Oleh karenanya, Marx sangat getol meneriaki

⁶ Amartya Sen, *An Ethics And Economics*, (Oxford: Blackwell Publishers, 1988), hal. 22-23. Manusia, menurut kaum Stoa, harus menganggap dirinya bukan sebagai sesuatu yang terasing dan terpisah, tetapi sebagai warga dunia, sebagai anggota dari kekayaan alam yang sangat luas, dan untuk kepentingan komunitas yang hebat ini, dia seharusnya sama sekali-kali bersedia mengorbankan kepentingan-kepentingannya.

⁷ Ahmad Baidlowi Dan Imam Baehaqi (Penerj.), *Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, diterjemahkan dari buku, Henry J. Schmandt, *A History Of Political Philosophy*, (AS: The Bruce Publishing Company, 1960), (Jakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 63.

⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 328.

terwujudnya penghapusan hak kepemilikan pribadi atas faktor produksi, sehingga memungkinkan penghapusan perbudakan dan alienasi terhadap kelas pekerja/kaum proletariat.

Namun pendapat Marx di atas memunculkan banyak kritik dan perdebatan hingga hari ini, terkait dengan efektivitas konsep negara sosialis atau negara komunis yang ia perjuangkan. Franz Magnis-Suseno, mengkritisi konsep penghapusan hak milik dan penghapusan kelas sebagaimana yang digagas oleh Marx, sebab menurutnya hal tersebut adalah nihil. Suatu hal yang tidak dapat disangkal ialah bahwa kendati pun kelompok masyarakat melakukan gerakan revolusi, tentu secara spontanitas akan muncul seseorang atau sekelompok kecil orang yang menjadi promotor utama atau pemimpin gerakan tersebut. Lantas, setelah gerakan revolusi tersebut selesai, setiap kelompok yang berkuasa memiliki kepentingan atau ambisi tersendiri untuk mempertahankan kekuasaan dan tidak serta merta melepas peran sebagai pemimpin atau penguasa.⁹ Penguasa akan tetap ada secara *de facto* dan dengan demikian cita-cita penghapusan negara kelas tidak mungkin akan terwujud. Kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai akan tetap selalu ada. Oleh karenanya, sistem negara sosialis atau komunis dengan sendirinya tidak menjadi jawaban yang tepat.

Lantas seperti apa tawaran kontekstual dalam upaya meretas diskriminasi sosial dewasa ini? Jawabannya adalah dengan mengoptimalkan sistem politik suatu negara. Sistem politik demokrasi di Indonesia yang secara idealis dinilai mampu menjunjung tinggi suara rakyat secara keseluruhan, sejatinya perlu dioptimalkan dan dijunjung tinggi. Sistem politik demokrasi memungkinkan langkah pencegahan terhadap golongan tertentu yang mengambil kekuasaan bagi kepentingan mereka sendiri, dari pemusatannya kepada diri atau lingkungan mereka sendiri. Akan tetapi, terdapat beberapa catatan dalam pembacaan terhadap efektivitas sistem politik

⁹ *Ibid.*, hal. 344.

demokrasi dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat umum sebagai salah satu tujuan hukum di Indonesia.

Pertama, dalam sistem demokrasi terdapat dua spirit yang saling bertentangan, yakni kesetaraan dan kebebasan.

“On one side we have the liberal tradition constituted by the rule of law, the defence of human rights and the respect of individual liberty; on the other the democratic tradition whose main ideas are those of equality, identity between governing and governed and popular sovereignty”.¹⁰

Nampak kontradiksi ketika di satu sisi, ada tradisi liberal yang menjunjung tinggi kehormatan terhadap kebebasan individu dan tradisi demokratis yang ide utamanya adalah kesetaraan. Kebebasan yang kemudian salah diterjemahkan tentu dengan sendirinya akan mencoreng nilai kesetaraan dan persatuan (*unitas*). Kebebasan individu akan menciptakan ketidaksetaraan terutama dalam distribusi kekayaan maupun distribusi kekuasaan.

Prahara *kedua*, catatan buruk demokrasi sebagai yang juga menjadi *scandalum* (batu sandungan) adalah sistem demokrasi elektoral, yang mana selalu membutuhkan uang sebagai penggerak. Sistem demokrasi tentunya dikendalikan oleh pemerintah yang notabene telah berkontaminasi langsung dengan pengaruh kepentingan para elit pasar dan kaum oligark. Hal ini dapat disepakati, karena realitas memperlihatkan bahwa tidak ada tembok pemisah antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Sebuah situasi atau keadaan yang menjadi faktor utama tumbuh suburnya politik oligarki dalam suatu sistem pemerintahan.

¹⁰ Chantal Mouffe, *The Democratic Paradox*, (London: Verso, 2000), hal. 3-4. Pada satu sisi kita memiliki tradisi liberal yang dibentuk oleh supremasi hukum, yang menekankan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kebebasan individu; di sisi lain tradisi demokratis yang ide utamanya adalah persamaan, identitas antara memerintah dan diperintah dan kedaulatan rakyat.

Dalam konstelasi politik demokrasi di Indonesia terdapat tiga wadah yang menjadi instrumen utama dalam menerjemahkan sistem demokrasi di atas, di antaranya pasar, *parpol* dan konstelasi *pemilu*. Kekuatan sumber daya material yang dimiliki oleh kelompok penguasa sumber daya material yakni kaum oligark, memungkinkan ketiga komponen ini dikendalikan dan dimobilisasi demi kepentingan-kepentingan tertentu. Kaum oligark dengan sumber daya ekonomi yang dikuasainya mampu memengaruhi pasar, partai politik, konstelasi demokrasi dan menguasai faktor produksi kebijakan. Politik oligarki menekankan pada kekuatan sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pribadi. Ketidaksetaraan penguasaan sumber daya material ikut menghasilkan ketidaksetaraan kekuasaan politik. Hal ini menjadi alasan kenapa Indonesia kendati pun menganut sistem politik demokrasi, masih memungkinkan terjadi praktik oligarki. Bertolak belakang dengan pemahaman yang menyatakan bahwa semakin demokratis suatu negara ruang gerak oligark semakin sempit.

Kekuasaan dengan kapasitas sumber daya material yang memadai merupakan sumber kekuasaan yang paling fleksibel, berdaya tahan kuat, dan dapat dimanfaatkan untuk meraih sumber kekuasaan yang lain. Demokrasi yang dikangkangi oleh kaum oligark, ditandai dengan menguatnya dominasi kekuasaan material dalam percaturan politik, jurang antara yang kaya dan yang miskin semakin besar, menurunnya partisipasi rakyat dalam mengontrol dan mengendalikan sistem politik dan adanya kolonialisasi pasar dalam sistem politik. Kala sistem politik demokrasi mengutamakan kepentingan rakyat, pada politik oligarki, yang diutamakan adalah kepentingan para pemegang kekuasaan, pengusaha dan partai.¹¹ Sehingga menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap mempertahankan kekayaan dan atau meningkatkan kekayaan pribadi.

¹¹ Peter Tan, *Paradoks Politik Pertautannya Dengan Agama Dan Kuasa Di Negara Demokrasi*, (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2018), hal. 54

Pernyataan ini mengafirmasi presensi konsep negara kelas yang terbentuk di Indonesia sebagai dampak lanjutan dari matinya nalar demokrasi serta pembodohan bangsa. Antara para pemilik kekuasaan (pemilik modal) dan kaum buruh/pekerja. Kaum oligark melalui regulasi yang ada, memusatkan usaha mereka untuk menjaga kekayaan atau menambah pundi-pundi kekayaan. Konstelasi pemilu kemudian hanya merupakan kristalisasi dari oligarki partai yang menggunakan suara rakyat untuk membangun aliansi politik baru. Suara dari rakyat dalam pesta demokrasi hanya bertujuan untuk mengokohkan kelompok yang mereka telah bentuk sebelumnya. Kendati pun ritual demokrasi berjalan melalui sistem pemilihan umum, namun toh yang dipilih juga merupakan tokoh-tokoh yang sudah ditentukan oleh kaum oligark sebelumnya. Dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat hanya sampai pada tataran memilih calon pemimpin (pemerintah).

Jika dalam perjuangannya, Karl Marx menjunjung terbentuknya kediktatoran proletariat dan konsep negara komunis, maka perjuangan hari ini dapat terwujud di Indonesia dengan tindakan optimalisasi konsistensi sistem politik demokrasi. Pandangan materialisme Marx perihal sentralisasi sistem ekonomi sebagai faktor utama yang memengaruhi tatanan politik serta komponen struktur atas lainnya perlu dikritisi. Analisis Marx tentang basis (*unterbau*) dan bangunan atas (*uberbau*); yang bersifat satu arah perlu diperbaiki. Praktik oligarki menjadi fenomena konkret bahwa sistem politik pun dapat memengaruhi sistem ekonomi. Oligarki dilihat sebagai ‘borok’ yang melekat dalam tubuh demokrasi, karena adanya sikap eksploitatif sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi atau kelompok minoritas tertentu.

Oleh karena itu, munculnya kelompok oligark dan problematika oligarki dalam sistem politik demokrasi mengindikasikan Indonesia sebagai negara kelas. Teori kelas Karl Marx dinilai masih relevan untuk dijadikan sebagai pisau bedah atau metode pendekatan untuk memahami

konstelasi politik demokrasi Indonesia yang ditunggangi kepentingan para oligark. Kita dihantar pada titik persoalan perihal kesenjangan penguasaan sumber daya material dan kesadaran akan pengkelasan sosial; antara kaum oligark (beserta penguasa) dan masyarakat kecil, dalam mengelola sumber daya yang ada bagi kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, sebagai bentuk keterlibatan teoritis untuk mengangkat persoalan ini dalam ranah akademik dan dengan pendekatan filosofis, penulis ikut mengambil tugas serta tanggung jawab sebagai masyarakat dengan mengkritisi dan berupaya merumuskan solusi politik yang efektif, dalam tulisan yang berjudul: **Teori Kelas Karl Marx Dan Kritik Atas Problematika Oligarki Di Indonesia.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, yakni:

1. Apa yang dimaksudkan Karl Marx tentang Teori Kelas?
2. Apa itu Sistem Politik Demokrasi, Oligarki dan praktik Oligarki di Indonesia?
3. Bagaimana pembacaan terkini tentang Demokrasi dalam himpitan praktik Oligarki?
4. Apa relevansi Teori Kelas Marx dengan kritik atas praktik oligarki di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Inventarisasi

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang kritis dan komprehensif mengenai pemikiran Karl Marx tentang Teori Kelas dan korelasinya dengan sistem politik demokrasi dan problematika oligarki di Indonesia, maka penulis berupaya untuk mendalami penjelasan-penjelasan serta uraian-uraian akademis dari berbagai macam informasi pembelajaran yang berhasil diperoleh. Melalui studi pustaka, penulis mencoba mendalami buku-buku karya Karl Marx sendiri dan sumber-sumber bacaan yang relevan lainnya. Hingga pada akhirnya mampu

memahami konsep-konsep dasar seperti; konsep teori kelas Karl Marx, politik demokrasi, kaum oligark, dan praktik oligarki di Indonesia.

1.3.2 Evaluasi Kritis

Berdasarkan informasi kepustakaan yang tersedia, penulis akan mengulas secara kritis untuk mendapatkan sintesa pemikiran. Konsep tentang teori kelas akan dikaji secara terperinci terkait perkembangannya untuk menemukan kekuatan dan kelemahan konsep tersebut agar kemudian diperjumpakan dengan konstelasi politik demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan maraknya praktik oligarki dalam setiap kebijakan yang dibuat sebagai bentuk nyata atas studi relevansi yang hendak dicapai.

1.3.3 Sintesis

Hasil pengumpulan atas data dan informasi yang diperoleh dari studi pustaka mengenai konsep teori kelas dan pendapat dari para pemikir pasca-Marx, maka dikembangkan suatu pemahaman yang lebih menyeluruh. Karenanya penulis akan membuat sintesa pemikiran yang menyimpulkan semua unsur-unsur terkait.

1.3.4 Pemahaman Baru

Penulis kemudian mengusahakan suatu bentuk pemahaman baru, sebagai muatan tambahan pada lapisan epistemik pemikirannya, terkait dengan konsep-konsep pemikir Marx yang masih sangat relevan hingga saat ini dalam mengulas tema-tema sosial, politik dan ekonomi.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Kegunaan Akademis

Pada satu sisi penelitian ini bertujuan agar memadatkan nalar kritis terhadap suatu pemahaman yang bagus terkait konsep negara kelas yang masih sangat relevan untuk dijadikan pisau bedah terhadap polemik perpolitikan di tanah air dewasa ini. Selain itu, penelitian ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana filsafat di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira – Kupang.

1.4.2 Kegunaan Institusional

Tulisan ini merupakan bentuk proses pemberdayaan kemampuan intelektual dan kapasitas nalar kritis, sehingga diharapkan mampu memberi sumbangan terhadap pemberdayaan citra ilmiah lembaga Perguruan Tinggi Universitas Katolik Widya Mandira – Kupang pada umumnya. Dan secara khusus melalui karya tulisan ini, diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi intelektual dan kepekaan terhadap daya pacu para mahasiswa Fakultas Filsafat yang ingin menekuni penelitian dalam bidang filsafat dan secara khusus pada filsafat politik.

1.4.3 Kegunaan Sosial

Terdapat begitu banyak persoalan yang menggerogoti perkembangan demokrasi kita, sehingga pada akhirnya yang muncul di ruang publik bukan lagi kebijakan yang pro rakyat, tetapi bentuk-bentuk kebijakan yang menelanjangi kesejahteraan hidup yang adalah cita-cita bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai bentuk internalisasi nilai etika sosial, penulis berupaya membedah polemik politik demokrasi beserta praktik oligarki, dalam koridor pemikiran Karl Marx sebagai upaya untuk membenah marwah

politik demokrasi di Indonesia yang pro terhadap rakyat, yang adalah pemilik kedaulatan tertinggi.

1.4.4 Kegunaan Personal

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan persyaratan akademik. Tetapi, melalui tulisan ini penulisan mengukur daya kritis dan kecakapan argumentatif tertulis dalam melihat dan menilai persoalan atau problem perpolitikan yang ada, sehingga mampu menciptakan ide-ide revolusioner sebagai bentuk ikut serta dalam upaya bela negara di masa *pascanasionalisme* saat ini.

1.5 Metode Penulisan

Penelitian ini berbasis pada studi relevansi. Mengangkat salah satu konsep dari pemikir terbesar materialisme; Karl Marx tentang Teori Kelas, lalu dirajut relevansi ke dalam konstelasi politik demokrasi di Indonesia. Dari literatur dan kepustakaan yang ada, penulis kemudian mendalami dan merefleksikannya secara filosofis pokok-pokok pemikiran Karl Marx untuk kemudian dikaitkan dengan situasi perpolitikan di tanah air, terutama terkait dengan problematika oligarki yang bersarang dalam sistem politik demokrasi di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis mengkaji topik studi ini dalam bingkai atau kerangka sistematis sebagai berikut:

Bab Pertama; merupakan pendahuluan yang memberikan penjelasan awal tentang apa, bagaimana dan mengapa penulis memilih mendalami konsep Teori Kelas Karl Marx dan menyulamnya dengan konstelasi politik demokrasi di Indonesia. Bagian pendahuluan ini terdiri atas; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua; merupakan paparan sekilas tentang biografi dan latar belakang pemikiran Karl Marx, yang di dalamnya diuraikan riwayat hidup Karl Marx, karya-karya yang menjadi jejak intelektualnya, beberapa konsep dan filsuf yang memengaruhi sistem pemikirannya.

Bab Ketiga; memberi ulasan terkait pikiran pokok Materialisme Karl Marx beserta kritik atasnya dan konsep umum tentang oligarki beserta beberapa ulasan terkait; seperti pengertian, sumber kekuasaan dan tipe-tipe oligarki. Fokus pembahasan oligarki yang diuraikan adalah definisi oligarki menurut Jeffrey A. Winters.

Bab Keempat, diuraikan secara khusus tentang teori kelas Karl Marx dan menelaah relevansi teori kelas Karl Marx terhadap problematika oligarki di Indonesia, sebagai bentuk pencarian akademis. Meniti lorong eksistensi sistem politik demokrasi modern yang dihipit praktik oligarki dan mencoba menguraikan upaya menyikapi praktik oligarki tersebut sebagai langkah solutif menyelamatkan marwah demokrasi.

Bab Lima; sebagai penutup atas tulisan, penulis menguraikan kesimpulan akhir dari pencaharian akademis dan catatan kritis sebagai rujukan untuk menilai bagaimana metode pendekatan yang tepat untuk mengatasi atau keluar